



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 ini merupakan bentuk komitmen nyata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau tahun 2021 – 2026 yang berisikan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indicator pencapaian sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Dengan selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau tahun 2023 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan berbagai masukan baik berupa data, informasi maupun saran-saran yang dapat membantu keberhasilan penyusunan laporan ini.



LKjIP **BPKD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023**

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja, serta dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Malinau dengan meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau pada masa yang akan datang.

Malinau, 31 Januari 2024

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Malinau,

Martha Daring, SE., MSi
Nip. 19801205 200604 2 019



LKjIP

BPKD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan daerah. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau tahun 2021-2026 tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun perencanaan tahunan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2023 menunjukkan bahwa capaian sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau tahun 2023 adalah 100% yang dapat dilihat pada tabel RE.1 :



Tabel RE.1
Capaian Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas Laporan keuangan OPD	WTP	WTP	100%
2	Meningkatnya kinerja pengelolaan BMD	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Persentase Pengelolaan Pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah	5.5 %	3,75 %	68.18 %
Rata-Rata Capaian Kinerja					100%

Dalam tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau telah melaksanakan 4 (empat) program kegiatan, yaitu Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program kegiatan tersebut diarahkan untuk memenuhi sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan prestasi capaian kinerja yang akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kinerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat



LKjIP

BPKD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023

lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan.

**DAFTAR ISI**

Halaman

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	2
C. Aspek Strategis Organisasi	3
D. Struktur Organisasi	7
E. Sumber Daya Manusia	8
F. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi	9
G. Sistematika Penyajian	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis Tahun 2021– 2026	13
1. Tujuan dan Sasaran	16
2. Indikator Kinerja	20
3. Strategi dan Arah Kebijakan	21
4. Program	23
B. Rencana Kinerja Tahunan	24
C. Perjanjian Kinerja	26



BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	28
	A. Capaian Kinerja Organisasi	29
	B. Analisis Capaian Kinerja	30
	1. Persentase Penyampaian LKPD Tepat Waktu dan Sesuai SAP	31
	2. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD.....	45
	3. Presentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah.....	53
BAB IV	PENUTUP	62

**DAFTAR TABEL**

	Halaman	
Tabel RE.1	Capaian Sasaran Strategis	iv
Tabel 1.1	Aspek Strategis Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	4
Tabel 1.2	Profil Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau Berdasarkan Golongan dan Pendidikan.....	8
Tabel 1.3	Analisis Lingkungan Internal Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	10
Tabel 2.1	Misi dan Tujuan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	16
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau.....	18
Tabel 2.3	Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau.....	20
Tabel 2.4	Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	23
Tabel 2.5	Rencana Kerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	24
Tabel 2.6	Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	25
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	29



Tabel 3.2	Analisis Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	30
Tabel 3.3	Pengukuran Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	32
Tabel 3.4	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah.....	33
Tabel 3.5	Penyampaian LKPD Tepat Waktu dan Sesuai SAP Triwulan IV Tahun 2023.....	34
Tabel 3.6	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023.....	39
Tabel 3.7	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir..	45
Tabel 3.8	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah.....	46
Tabel 3.9	Daftar Nama Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau Yang Sudah Melakukan Rekon Dan Mengumpulkan Laporan BMD T.A. 2023.....	47
Tabel 3.10	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023.....	52
Tabel 3.11	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	54
Table 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	55



Tabel 3.13	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Triwulan IV Tahun 2023.....	55
Tabel 3.14	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023.....	60



LKjIP

BPKD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau	7



LKjIP

BPKD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pengukuran Kinerja



BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dasar pembentukan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengalami dua kali perubahan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014; dan terakhir di ubah dari Bagian menjadi Badan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malinau No. 9 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Malinau N0.5 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau; Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 44);

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Bab III tentang kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten/kota Pasal 46 ayat (2) yang berbunyi Badan Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh kepala badan daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini dikuatkan lagi dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Malinau pada Bab II bagian kedua Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 31 menyatakan “Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau menyelenggarakan fungsi dibidang unsur penunjang Urusan Pemerintahan.

2. Tugas Pokok

Ada pun tugas Pokok Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau adalah

1. Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Malinau dibidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, aset daerah Kabupaten Malinau, pajak daerah Kabupaten Malinau I, pajak daerah Kabupaten Malinau II yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Malinau dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Malinau.



2. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, perubahan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau serta membina Administrasi Keuangan;
3. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati.

3. Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas tersebut di atas juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Aspek Strategis Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menetapkan Aspek Strategis sebagai berikut :



Tabel 1.1
Aspek Strategis Organisasi
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik (Good Governance)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian LKPD Tepat Waktu dan Sesuai SAP
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan BMD	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Pengelolaan Pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah

D. Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi berdasarkan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau dengan ketentuan didalam nya sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
 - 1) Subbagian Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Subbagian Penyusunan Program.



- c. Kepala Bidang Anggaran:
 - 1) Kepala Subbidang Anggaran I;
 - 2) Kepala Subbidang Anggaran II;
 - 3) Kepala Subbidang Anggaran III;
- d. Kepala Bidang Akuntansi:
 - 1) Kepala Subbidang Pembukuan, Penerimaan dan Pengeluaran (Akuntansi);
 - 2) Kepala Subbidang Verifikasi LKPD;
 - 3) Kepala Subbidang Pelaporan LKPD.
- e. Kepala Bidang Perbendaharaan:
 - 1) Kepala Subbidang Penatausahaan dan Penerimaan Kas Daerah;
 - 2) Kepala Subbidang Pengeluaran Kas Daerah;
 - 3) Kepala Subbidang Pelaporan Kas Daerah.
- f. Kepala Bidang Aset Daerah Kabupaten Malinau:
 - 1) Kepala Subbidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 2) Kepala Subbidang Pengelolaan Inventaris dan Pengamanan Barang Milik Daerah;
 - 3) Kepala Subbidang Analisa Kebutuhan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- g. Kepala Bidang Pajak I:
 - 1) Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan I;



2) Kepala Subbidang Penetapan, Penagihan dan Pelayanan Keberatan I;

3) Kepala Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi I.

h. Kepala Bidang Pajak II:

1) Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan I;

2) Kepala Subbidang Penetapan, Penagihan dan Pelayanan Keberatan I;

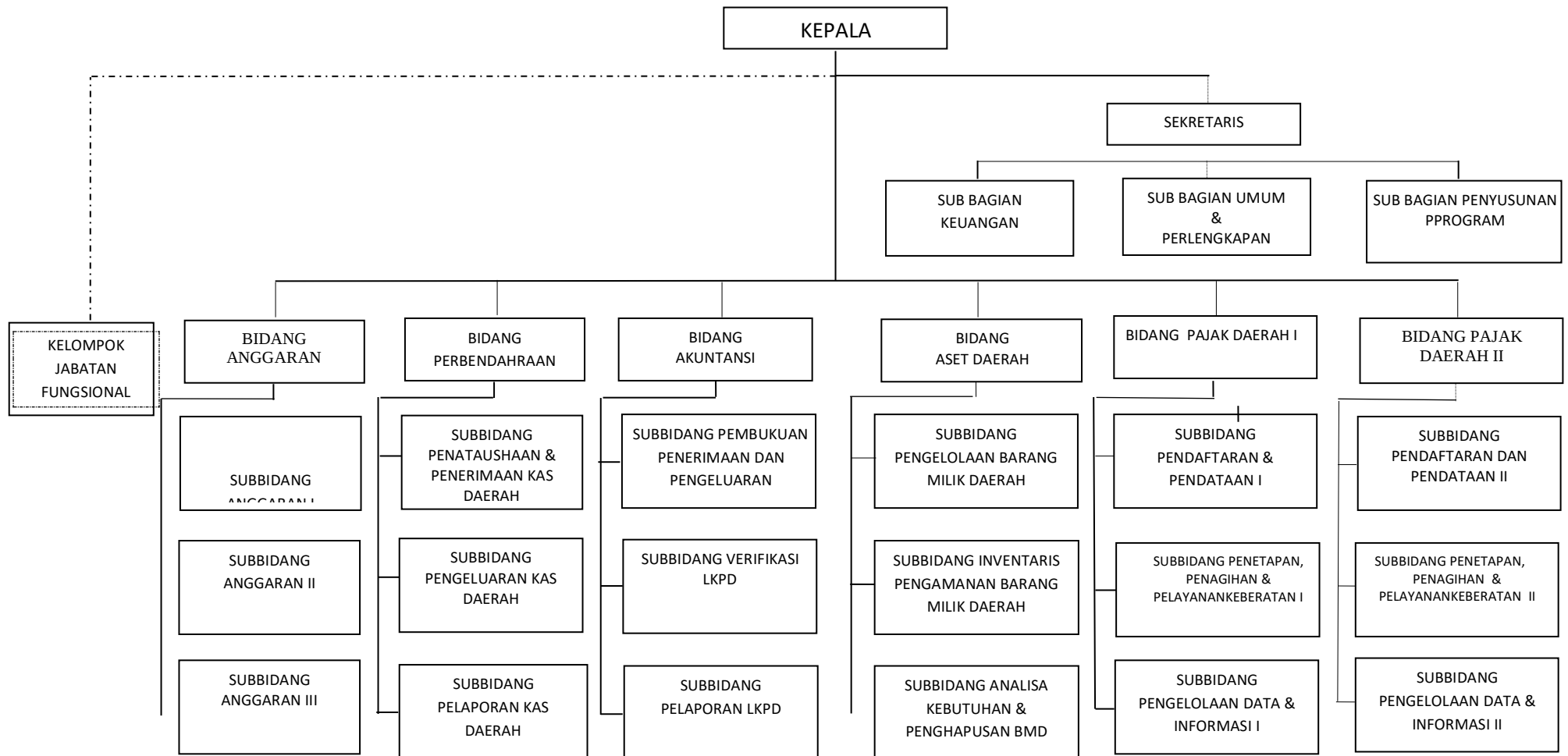
3) Kepala Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi

Sekretaris dan masing-masing Kepala Bidang sebagaimana dimaksud berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Adapun struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau dapat disaji pada bagan 1.1.



Bagan 1.1
Struktur Organisasi





E. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau per 31 Desember 2023 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 81 orang yang terdiri dari 27 orang pejabat struktural dan 54 orang staf non struktural. Secara rinci komposisi SDM Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau menurut tingkat pendidikan dapat dilihat dalam Lampiran Renstra ini.

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada belum mencukupi kebutuhan, karena dari segi keahlian pegawai yang ada masih belum memadai. Adapun sumber daya manusia yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau Per 31 Desember 2023 Sebanyak 81 orang, secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.2

**PROFIL PEGAWAI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MALINAU BERDASARKAN GOLONGAN DAN PENDIDIKAN**

NO	GOL	PENDIDIKAN							JABATAN DAN POSISI DALAM ORGANISASI
		SLTP	SLTA	D II	D III	S I	S2	S3	
1	IV / e	-	-	-	-	-		-	
2	IV / d	-	-	-	-	-		-	
3	IV / c	-	-	-	-	-		-	
4	IV / b	-	-	-	-	-	1		- kaban
5	IV / a	-	-	-	-	-	7	-	- Kabid Aset - Kabid Perben



									- Kabid Akutansi - Kasubbag Kepegawaian dan produk Hukum - Kaubbid Pengelolaan BMD
6	III / d	-	-	-	1	4	8	-	
7	III / c	-	-	-	-	11	8	-	
8	III / b	-	-	-	-	7	1	-	
9	III / a	-	9	-	4	15	-	-	
10	II / d	-	8	-	-	-	-	-	
11	II / c	-	2	-	-	-	-	-	
12	II / b	-	2	-	-	-	-	-	
13	II / a	-	-	-	-	-	-	-	
14	I / d	-	-	-	-	-	-	-	
15	I / c	-	-	-	-	-	-	-	
16	I / b	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah		-	21	-	5	37	25	0	

F. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi

Dalam Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap institusi maupun organisasi yang ada tentunya memiliki kondisi internal yang mendorong atau sebaliknya menghambat proses pelaksanaan dari program yang telah ditetapkan. Analisis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau terhadap kondisi internal yang menghalangi atau menghambat tercapainya proram yang telah ditetapkan, di arahkan pada:



1. Dukungan dari semua komponen perangkat kerja yang ada.
2. Proses manajemen SDM yang ada maupun pemanfaatan dari semua komponen perangkat kerja yang ada.
3. Hasil yang dicapai selama satu tahun berjalan.
4. Perbaikan atau tindakan koreksi yang telah diambil.

Segenap aset yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau di sebut lingkungan internal. Di dalamnya mencakup : SDM, Struktur Organisasi, Komponen Perangkat kerja yang digunakan dan bangunan kantor. Adapun lingkungan internal yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau Kabupaten Malinau sebagai berikut :

Tabel 1.3

Analisis Lingkungan Internal

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau

No	Lingkungan Internal (Kekuatan)	No	Kelemahan
1	Tersedianya Peraturan Perundang-undangan maupun Perangkat alat Kerja yang dibutuhkan.	1	-
2	Tersedianya dukungan dan komitmen dari pimpinan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik	2	-
3	Mengedepankan Asas Koordinasi dalam Pelaksanaan tugas, baik secara Vertikal maupun Horizntal.	3	Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan dengan SDM aparatur yang ada, masih belum optimalnya jumlah serta



			kapasitas SDM aparatur dibutuhkan.
4	Sistem data dan informasi yang efektif dan efisien	4	-
5	Menganalisis dan mengevaluasi data serta Informasi Kinerja yang telah terkumpul	5	-

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kab. Malinau

G. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bertujuan mengkomunikasikan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau selama tahun 2023. Capaian kinerja (*Performance Result*) dalam tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kerja (*Performance Plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Sistematika dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026

Dengan adanya Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau maka dengan demikian Rencana strategis akan lebih memiliki arah kebijakan yang jelas guna menunjang keberadaan kegiatan organisasi pemerintah daerah sebagai unit organisasi yang otonom, memiliki kinerja yang lebih baik, memiliki wawasan ke depan serta menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang akan dicapai dalam periode 5 (lima) tahun seperti yang tercakup dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026.

Berikut Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau:

Perwujudan visi BPKD melalui implementasi misi diprioritaskan untuk mendukung dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, pada tahun 2021-2026 diarahkan untuk mendukung lima program unggulan Pemerintah Daerah, yaitu :

1. Program Desa Sarjana
2. Program Milenial mandiri
3. Program Rasda Plus
4. Program RT Bersih



5. Program WM Malinau Maju (Wajib Belajar, Malinau maju)

a. VISI

Rumusan Visi BPKD Kabupaten Malinau adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang akan dicapai, dikaitkan dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, fungsi dan tugas pokok. Perumusan visi BPKD adalah :

Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerntahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

Arti yang terkandung dari visi di atas adalah:

Efektif	Terselenggaranya tata kelola keuangan yang optimum dalam kinerja dan keluaran yang dihasilkan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi Daerah.
Efisien	Tersajinya informasi keuangan Daerah yang tepat waktu, tepat sasaran dan tepat prosedur sesuai dengan peraturan perundangan keuangan yang berlaku.
Kredibilitas	Terwujudnya tata kelola keuangan yang menghasilkan laporan keuangayang terpercaya, handal dan dapat diuji kebenarannya.
Akuntabel	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



b. Misi

Misi

Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

Untuk mewujudkan visi BPKD sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran BPKD yaitu sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi keuangan daerah terkini secara cepat, tepat dan akurat bagi unsur pimpinan maupun pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pengambilan keputusan dan arah kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten Malinau
2. Mengelola keuangan daerah secara optimum sehingga menghasilkan laporan keuangan Daerah Kabupaten Malinau secara periodik yang dapat dipergunakan pihak intern maupun ekstern guna kelancaran penyerapan anggaran pembangunan Daerah Kabupaten Malinau
3. Mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) BPK-RI atas laporan keuangan daerah sebagai wujud Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
4. Meningkatkan realisasi penyerapan anggaran daerah melalui efisiensi prosedur administrasi keuangan, Akuntansi berbasis AkruaL dan kerja sama lintas sektoral baik saat penyusunan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban APBD



5. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur keuangan daerah baik aparatur pengelola keuangan desa, kecamatan maupun SKPD melalui pelatihan, bimtek, sosialisasi dan konsultasi sehingga terwujud aparatur pengelola keuangan Daerah Kabupaten Malinau yang profesional, berkualitas dan berintegritas
6. Meningkatkan akselerasi penyerapan dan kualitas kegiatan Gerdema, RT Bersih dan Dana Desa melalui system informasi keuangan desa
7. Meningkatkan potensi pendapatan asli daerah setiap tahun
8. Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikan tujuan ini maka Badan Pegelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau dalam tahun yang akan datang akan diarahkan pada pencapaian tujuan masing – masing Misi sebagai berikut:

Tabel 2.1
Misi dan Tujuan
Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau

MISI	TUJUAN
1. Melaksanakan Penyusunan rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	2. Menyiapkan RAPBD dan APBD Kabupaten Malinau



2. Menyusun dan mengembangkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Tahap Pelaporan Administrasi Belanja Langsung maupun Tidak Langsung	1. Menyiapkan Laporan Adminstrasi Belanja langsung dan tidak langsung. 2. Mengembangkan Kerjasama dan Sinergitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau
3. Menyusun dan Mengembangkan Sistem Pelaporan Keuangan melalui Laporan Realisasi Keuangan, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan	1. Menyiapkan data base Laporan Keuangan yang Komprehensif
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Teknis Bagian Pengelola Keuangan yang inovatif melalui penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Menyiapkan daya dukung organisasi terhadap teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas: SMART (Specific, Measurable, Acceptable, Result, Timelines).

Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategik yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tahunan/ jangka pendek.



Berdasarkan fokus sasaran tersebut secara lebih operasional, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau menjabarkan sasaran dan tujuan untuk tahun 2023 pada bagian berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran
Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Menyiapkan RAPBD dan APBD Kabupaten Malinau.	• Tersusunnya APBD dan APBDP
2	Menyiapkan Laporan Administrasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung	• Tersusunnya Laporan Administrasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung
3	Mengembangkan Kerjasama dan Sinergitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau	• Tersusunnya Rencana Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau • Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
4	Menyiapkan database hasil Laporan Keuangan Kabupaten Malinau yang Komprehensif	• Tersusunnya Laporan Keuangan Kabupaten



		Malinau dan laporan Pertanggungja waban Keuangan Daerah • Tersedianya sistem informasi data yang up to date • Terlaksananya Verifikasi dan Evaluasi atas Pelaksanaan Dokumen Anggaran Pembangunan Kabupaten Malinau
5	Menyiapkan daya dukung organisasi terhadap teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau	• Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah • Tersedianya sumber daya Bagian Pengelola Keuangan yang berkualitas dan handal



2. Indikator Kinerja

Adapun pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan adanya suatu ukuran atau indikator, Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta tugas yang dilaksanakan.

Indikator Kinerja Utama (*Outcome*) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau merupakan indikator kinerja yang berada pada ukuran manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau dalam melaksanakan urusan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (*output*).

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.3
Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja
Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau

N o	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian LKPD Tepat Waktu dan Sesuai SAP



2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian LKPD Tepat Waktu dan Sesuai SAP
3	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah

3. Strategi dan Arah Kebijakan

a) Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau

Proses perencanaan strategi sebagaimana yang tertera pada Renstra Bagian Pengelola Keuangan TA 2021-2026, merupakan pedoman dan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan



yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran.

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan cara pencapaiannya. Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran meliputi penetapan Strategi. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau menetapkan strategi dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, sebagai berikut;

1. Melaksanakan dan mengembangkan Pengelolaan keuangan Daerah berbasis teknologi informasi secara konsisten
2. Melaksanakan Pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan dan akuntabel
3. Menyajikan laporan keuangan daerah sesuai dengan SAP berbasis akrual
4. Mengembangkan sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah
5. Peningkatan partisipasi desa dalam perencanaan, penganggaran, pengendalian, pelaksanaan dan Pengelolaan keuangan Desa
6. Penyebarluasan informasi pajak dan retribusi daerah
7. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
8. Meningkatkan kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana penunjang Pengelolaan keuangan daerah
9. Melaksanakan dan mengembangkan kualitas Pengelolaan barang milik daerah

b) Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau



Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi program dan kegiatan, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Malinau. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Malinau menetapkan 3 (tiga) kebijakan dengan uraian, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau.
- 2) Memperkuat kemampuan SDM Aparatur.
- 3) Mengikuti perkembangan Regulasi tentang keuangan Daerah

4. Program

Program Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 sebagai penjabaran dari tujuan stratejik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau

No	Program	Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah



3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang rencana jangka pendek akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau untuk mencapainya pada tahun 2023.

Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Target kinerja dari sasaran strategis yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahunan
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian LKPD Tepat Waktu dan Sesuai SAP	Predikat	WTP



2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan BMD	Persentase ketepatan waktu penyampaian BMD	Persen	100 %
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Presentase pengelolaan Pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah	Persen	5,5 %

Adapun Rencana Kerja terhadap program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Rencana Kerja Tahun 2023
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	65.436.664.026,00	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	581.547.959.789,00	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.497.168.279,00	APBD
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.975.884.500,00	APBD



C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Dengan Perjanjian Kinerja, diharapkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau dapat lebih terarah dan terdapat tolok ukur bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malinau.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :



LKjIP

BPKD KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023

**BAB III****AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin membaik. Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran capaian kinerja organisasi tahun 2023 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas tahunan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2023 dan membandingkan dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja 2023. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3.1
Target Realisasi dan Capaian indikator Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian %
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian LKPD Tepat Waktu dan Sesuai SAP	100 %	100%	100 %
2	Meningkatnya kinerja pengelolaan BMD	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD	100 %	100%	100 %
3	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	5.5 %	3,75 %	68.18 %

Capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Malinau Tahun 2023 secara keseluruhan adalah sebesar 97,34 % dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai capaian tersebut merupakan rata-rata capaian seluruh indikator yang ditetapkan.

Berikut ini disajikan tabel progres Pelaporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pelaporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pertanggungjawaban Kepala Badan atas pelaksanaan tugas-tugas berdasarkan sasaran yang diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang. Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja sedangkan analisis adalah pengungkapan rincian mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang bertujuan :

Tujuan
“Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik (Good Governance)”

Pengukuran tujuan Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik (Good Governance) melalui 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut :

Tabel 3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

“Tersedianya Informasi Keuangan Daerah Kabupaten Malinau terkini secara Cepat dan akurat serta Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, Transparan dan akuntabel.”

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Persentase Penyampaian LKPD Tepat Waktu dan Sesuai SAP	Persen	100 %	100%	100 %



Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD	Persen	100 %	100%	100%
Presentase pengelolaan Pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah	Persen	5.5 %	3,75 %	68.18 %

1. Persentase Penyampaian LKPD Tepat Waktu dan Sesuai SAP

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Penyampaian LKPD Tepat Waktu dan Sesuai SAP terhadap laporan evaluasi triwulan IV tahun 2023 dapat terealisasi 100 % artinya opini WTP berhasil dicapai berdasarkan standar pemeriksaan BPK. Sasaran meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan indikator sasaran yaitu Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi sasaran utama dari beberapa target di Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mencapai visi dan tujuan. Pencapaian WTP opini BPK mencerminkan kinerja pengelola keuangan daerah dilakukan dengan maksimal. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah melakukan penyusunan laporan keuangan daerah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan penyajian yang diungkapkan juga sesuai dengan ketentuan. Penilaian tersebut menjadi indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern telah dilakukan secara efektif. Analisis capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dengan realisasi maupun capaian kinerja seperti yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Opini WTP BPK RI juga menggambarkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dipertanggungjawabkan pelaksanaannya sesuai kaidah pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun stakeholder terkait.

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Table 3.3

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi tahun 2021 Vs Tahun 2022	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Penyampaian LKPD Tepat Waktu dan Sesuai SAP	Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023 adalah perbandingan realisasi Status laporan keuangan daerah (Opini BPK) tahun 2023 yaitu WTP dengan realisasi tahun 2022 dengan opini WTP, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 100% terhadap capaian tahun 2023.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan daerah tahun 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan
Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase Penyampaian LKPD Tepat Waktu dan Sesuai SAP	%	100 %	100%	100 %

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan Persentase Penyampaian LKPD Tepat Waktu dan Sesuai SAP dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 100 % maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 persentase capaian kinerja Penyampaian LKPD Tepat Waktu dan Sesuai SAP sebesar 100 % terhadap target akhir Renstra tahun 2026.

***c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan***

Pencapaian WTP mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah melakukan penyusunan laporan keuangan daerah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan penyajian yang diungkapkan juga sesuai dengan ketentuan. Penilaian tersebut menjadi indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern telah dilakukan secara efektif. Analisis capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dengan realisasi maupun capaian kinerja seperti yang diharapkan oleh pemerintah daerah.

Tabel 3.5
Penyampaian LKPD Tepat Waktu dan Sesuai SAP
Triwulan IV Tahun 2023

No	OPD yang menyampaikan laporan	Sudah menyampaikan laporan	Belum menyampaikan laporan
1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	100 %	
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100 %	
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 %	
4	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	100 %	
5	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	
6	Bappeda dan Litbang	100 %	
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100 %	
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100 %	
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 %	
10	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100 %	
11	RSUD MALINAU	100 %	
12	Dinas Ketahanan Pangan	100 %	
13	Dinas Ketenagakerjaan	100 %	
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	
15	Dinas Lingkungan Hidup	100 %	
16	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 %	
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100 %	
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	100 %	
19	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100 %	
20	Dinas Pendidikan	100 %	
21	Dinas Perhubungan	100 %	



22	Dinas Perikanan	100 %	
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100 %	
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100 %	
25	Dinas Pertanian	100 %	
26	Inspektorat	100 %	
27	Kecamatan Bahau Hulu	100 %	
28	Kecamatan Kayan Hilir	100 %	
29	Kecamatan kayan Hulu	100 %	
30	Kecamatan Kayan Selatan	100 %	
31	Kecamatan Malinau Barat	100 %	
32	Kecamatan Malinau Kota	100 %	
33	Kecamatan Malinau Selatan	100 %	
34	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	100 %	
35	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	100 %	
36	Kecamatan Malinau Utara	100 %	
37	Kecamatan Mentarang	100 %	
38	Kecamatan Mentarang Hulu	100 %	
39	Kecamatan Pujungan	100 %	
40	Kecamatan Sungai Boh	100 %	
41	Kecamatan Sungai Tubu	100 %	
42	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100 %	
43	Sekretariat Daerah	100 %	
44	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	100 %	

sebagaimana Pengukuran Pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan penilaian sebagai berikut;

Dasar penilaian capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Status Laporan Keuangan Daerah (OPINI BPK)= WTP



Opini WTP juga menggambarkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah telah dipertanggungjawabkan pelaksanaannya sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun *stakeholder* terkait.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi atas kualitas laporan keuangan dengan mempertimbangkan indikator:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan
3. Kualitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Selain itu, ada 5 kriteria yang menjadi dasar penilaian atas kewajaran atas laporan keuangan antara lain, (1) Keterjadian dan Keberadaan, (2) Penilaian, (3) Hak dan Kewajiban, (4) Kelengkapan, (5) Pengungkapan. Kabupaten Malinau senantiasa berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan sampai pelaporan.

Keberhasilan dalam pencapaian target bukan berarti tidak ada permasalahan atau kendala. Adapun permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target antara lain:

- a. Data yang tidak akurat/data yang tidak valid
- b. Laporan Keuangan dari setiap SKPD yang lambat atau tidak tepat waktu
- c. Dari sisi data, data belum semua OPD tertata dengan baik/belum tertib.

Dalam upaya peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau pada tahun yang akan datang perlu dilakukan Alternative maupun strategi sebagai berikut;



- a. Komitmen semua ASN dan *stakeholder* maupun pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Peran APIP dalam pemantauan penerapan SPI di masing-masing OPD perlu dioptimalkan
- c. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan melalui program peningkatan kapasitas aparatur, khususnya aparatur pengelola keuangan, maupun melalui upaya perbaikan sistem dan kebijakan sistem dan kebijakan akuntansi serta manajemen .
- d. Perbaikan sistem melalui rencana aksi (*action plan*) agar proses perbaikan yang dilakukan jelas, terarah, terukur dan terpadu. Sehingga kelemahan dalam pengelolaan keuangan tidak terulang dimasa yang akan datang.
- e. Memprioritaskan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan.
- f. Tertib penyampaian laporan keuangan.
- g. Mengadakan pelatihan/bimtek mengenai pengelolaan keuangan daerah pada SKPD.
- h. Menyelenggarakan bimtek dan sosialisasi terkait Surat Edaran penyusunan laporan keuangan.
- i. Melakukan sinkronisasi data keuangan setiap bulan dengan OPD terkait.

d. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai

baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya.

Efektivitas juga menggambarkan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900.327 tahun 1996 tentang penilaian dan pencapaian kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sesuai tabel berikut :

Tabel 3.2.4
Rasio Efektivitas dan Kriteria Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja

Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas
<i>1</i>	<i>2</i>
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya.



Pada tahun 2023 realisasi biaya untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Rp. 65.436.664.026,00 dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Rp. 581.547.959.789,00 sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 42.832.850.159,00 yang terealisasi sebesar Rp. 41.436.695.815,00 atau capaian realisasi keuangan sebesar 96,74 %.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan pelatihan penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan juga dapat meningkatkan efisiensi. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu mengurangi birokrasi, meningkatkan kecepatan dan akurasi pengumpulan dan pengolahan data, serta meminimalkan potensi kesalahan manusia.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Keuangan
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan	Persentase Penyampaian LKPD Tepat Waktu	100 %	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan :	95,91 %



Daerah	dan Sesuai SAP		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub kegiatan : Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
--------	-------------------	--	---	--



			Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
			Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan	97,34 %



			Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Sub kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran	
--	--	--	---	--



			Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Sub kegiatan : Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	
--	--	--	--	--



			Pelaksanaan APBD Kab /Kota Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kegiatan : Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Sub kegiatan : Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
--	--	--	--	--

Dari tabel 3.5 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan. Hasil capaian kinerja dan realisasi capaian keuangan pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung indikator kinerja berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan 95,91%. 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 97,34 % Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah.



2. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD terhadap laporan evaluasi triwulan IV tahun 2023 dapat terealisasi 100 % artinya berhasil dicapai berdasarkan standar Pemerintahan. Sasaran meningkatnya kualitas laporan Barang milik daerah dengan indikator sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan BMD menjadi sasaran utama dari beberapa target di Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mencapai visi dan tujuan. Pencapaian kinerja pengelola keuangan daerah dilakukan dengan maksimal. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah melakukan penyusunan laporan Barang Milik Daerah telah sesuai dengan standar pemerintahan dan penyajian yang diungkapkan juga sesuai dengan ketentuan. Penilaian tersebut menjadi indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern telah dilakukan secara efektif. Analisis capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah dapat disimpulkan bahwa Barang Milik daerah disajikan secara benar dengan realisasi maupun capaian kinerja seperti yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dipertanggungjawabkan pelaksanaannya sesuai kaidah pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun stakeholder terkait.

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Denga Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Table 3.7

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi tahun 2021 Vs Tahun 2022	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD	Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023 adalah perbandingan realisasi Status laporan Barang Milik Daerah tahun 2023 yaitu 100 % dengan realisasi tahun 2022 , maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 100 % terhadap capaian tahun 2023.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan daerah tahun 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD	%	100 %	100%	100 %

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan Persentase. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 100 % maka hasil perbandingan

tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 persentase capaian kinerja Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah sebesar 100 % terhadap target akhir Renstra tahun 2026.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Pengelolaan barang milik daerah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, serta dapat digunakan untuk dasar penyusunan laporan keuangan, Penelitian ini bertujuan menganalisis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah kabupaten Malinau. Siklus pengelolaan aset menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola kekayaan aset yang dimilikinya sehingga berimbas pada peningkatan manfaat dari kekayaan tersebut, baik dari segi jumlah maupun nilai kekayaan yang dimiliki. Sejak diterapkannya peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah serta berbagai bentuk peraturan berlaku lainnya diharapkan mampu menjadi acuan dan kekuatan pemerintah dalam mengelola aset daerahnya.

Berikut data Penyampaian laporan barang milik daerah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9
DAFTAR NAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MALINAU YANG SUDAH MELAKUKAN REKON DAN
MENGUMPULKAN LAPORAN BMD T.A. 2023

No	OPD yang menyampaikan laporan	REKON BMD BMD	LAPORAN BMD PER 31 DESEMBER 2023
1	DINAS PENDIDIKAN		
2	BAPPEDA DAN LITBANG	selesai	selesai
3	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	selesai	selesai
4	KECAMATAN SUNGAI TUBU	selesai	selesai
5	DINAS KESEHATAN PP DAN KB	selesai	selesai



6	DINAS PERHUBUNGAN	selesai	selesai
7	DLHD	selesai	selesai
8	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	selesai	selesai
9	RSUD	selesai	selesai
10	DISDUKCAPIL	selesai	selesai
11	DPUPRPERKIM		
12	DISBUDPAR	selesai	selesai
13	KESBANGPOL	selesai	selesai
14	DP3AS	selesai	selesai
15	SATPOL PP	selesai	selesai
16	BAGIAN TAPEM	selesai	selesai
17	DINAS PERTANIAN	selesai	selesai
18	BAGIAN EKONOMI	selesai	selesai
19	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	selesai	selesai
20	BAGIAN ORGANISASI	selesai	selesai
21	KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR	selesai	selesai
22	DISKOMINFO	selesai	selesai
23	DISPRINDAG	selesai	selesai
24	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	selesai	selesai
25	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	selesai	selesai
26	BAGIAN HUKUM	selesai	selesai
27	KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU	selesai	selesai
28	BKPP	selesai	selesai
29	DPMD	selesai	selesai
30	KECAMATAN KAYAN SELATAN	selesai	selesai
31	BAGIAN UMUM		
32	SEKRETARIAT DPRD	selesai	selesai
33	INSPEKTORAT	selesai	selesai
34	DPMPSTPTK	selesai	selesai
35	KECAMATAN MALINAU	selesai	selesai



	SELATAN		
36	BPBD	selesai	selesai
37	KECAMATAN MALINAU KOTA	selesai	selesai
38	KECAMATAN MALINAU UTARA	selesai	selesai
39	KECAMATAN MALINAU BARAT	selesai	selesai
40	KECAMATAN KAYAN HILIR	selesai	selesai
41	KECAMATAN SEI. BOH	selesai	selesai
42	KECAMATAN MENTARANG	selesai	selesai
43	KECAMATAN MENTARANG HULU	selesai	selesai
44	KECAMATAN PUJUNGAN	selesai	selesai
45	KECAMATAN KAYAN HULU	selesai	selesai
46	KECAMATAN BAHAU HULU	selesai	selesai
47	BPKD	selesai	selesai
48	DINAS PERIKANAN	selesai	selesai
49	BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA	selesai	selesai
50	DINAS KETAHANAN PANGAN	selesai	selesai
51	DINAS KETENAGAKERJAAN	selesai	selesai
52	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	selesai	selesai
53	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	selesai	selesai

sebagaimana Pengukuran Pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bidang aset menggunakan penilaian sebagai berikut;

Dasar penilaian capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Aset

$$\frac{\text{Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan BMD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100$$

Dari tabel-tabel yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemaparan alternative solusi yang telah diambil oleh Bidang Aset Daerah

Faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :



1. Mengadakan Rekonsiliasi inventarisasi Barang Milik Daerah untuk pelaporan Aset Triwulan dan Semester.
2. Mengadakan sensus barang milik daerah per 5 tahun sekali
3. Mengadakan sosialisasi pemanfaatan barang milik daerah setiap tahun.

Selain faktor keberhasilan, ada beberapa faktor yang biasa menjadi faktor penghambat atau kegagalan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Menginventarisasi barang milik daerah yang berada daerah perbatasan yang susah di jangkau.
2. Pergantian pengurus barang di pertengahan tahun.
3. Jaringan komunikasi di beberapa kecamatan kurang maksimal
4. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia pelayanan yang melayani

Adapun alternative solusi atau langkah-langkah perbaikan yang dilakukan kedepan adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan peningkatan kapasitas pengurus barang secara berkala dan berkelanjutan.
2. Mengadakan rekon laporan mutasi barang setiap 6 bulan sekali.
3. Berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi terkait.
4. Mengajukan penambahan jumlah Sumber Daya Manusia tenaga yang melayani.

d. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas 2 (dua) yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus :

Tabel 3.2.4
Rasio Efektivitas dan Kriteria Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja

Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas
<i>1</i>	<i>2</i>
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sumber daya adalah segala sesuatu yang merupakan aset untuk mencapai tujuannya. Sumber daya yang dimiliki dapat dikategorikan atas empat tipe sumber daya, seperti Finansial, Fisik, Manusia dan Kemampuan Teknologi.

Sumber daya manusia merupakan sektor sentral dan penting dalam rangka pencapaian tujuan di suatu bidang, karena dengan adanya kemampuan skill para pekerja dan kualitas sumber daya manusia dapat mengerjakan dengan baik dan benar. Kemampuan teknologi juga merupakan unsur penunjang penting dalam mengerjakan instansi, karena dengan adanya kelengkapan teknologi dan kecanggihan teknologi akan memudahkan berjalannya suatu pekerjaan.

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD Rp. 2.375.958.687,00 dari anggaran program Rp. 2.497.168.279,00.

kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung capaian kinerja indikator Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD sebesar Rp. 2.497.168.279,00 atau capaian realisasi keuangan sebesar 95,15 % jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar

100%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan di atas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 121.209.592,00 . atau sebesar 4,85 %.

untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pelatihan atau Training, tujuannya adalah untuk mengembangkan individu dalam hal meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan sikap yang dimiliki. Pendidikan, tujuannya adalah untuk peningkatan kualitas pekerjaan. Pembinaan, tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan dan agar karyawan mengerti tentang perusahaan baik aturan yang berlaku dan SOP Perusahaan Recruitment, tujuannya adalah untuk menentukan strategi apa yang digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kedepannya Penghargaan, tujuannya adalah untuk memotivasi pekerja untuk lebih giat lagi kedepannya.

***e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja***

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD kepada Aparatur yang ditunjang dengan sumber daya manusia aparatur, sarana, dan prasarana yang memadai ini didukung dengan adanya program Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah untuk memberikan pelayanan prima kepada aparatur yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Malinau. Untuk beberapa indikator yang belum mencapai target disebabkan karna masalah penganggaran yang mungkin berlebih maupun kurang sehingga dalam pelaksanaannya tidak mencapai target capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Keuangan (%)
Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian	100	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah <i>Kegiatan Pengelolaan</i>	95,15 %



Daerah	Laporan Barang Milik Daerah		Barang Milik Daerah	
			Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga Penatausahaan Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	

Dari tabel 3.8 di atas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan. Hasil capaian kinerja dan realisasi capaian keuangan pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa program yang mendukung indikator kinerja berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah dengan realisasi keuangan 95,15 %. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah Program Program Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui sub kegiatan Penyusunan Standar Harga, Penatausahaan Barang Milik Daerah. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang.

3. Presentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau Bidang Pajak Tahun 2023 sesuai dengan perjanjian kinerja yang tertuang ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja menunjukkan bahwa bidang pajak daerah telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dari hasil analisis pencapaian kinerja bidang pajak Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2023 .

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020, 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Table 3.11 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi tahun 2021 Vs Tahun 2022	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	3,25 %				

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023 adalah perbandingan realisasi Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah tahun 2023 yaitu dengan realisasi tahun 2022, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 100% terhadap capaian tahun 2023.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan daerah tahun 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Table 3.12

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	3,75 %	5.5	6,0

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 5.5 % maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 persentase capaian kinerja Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah sebesar 6.0 % terhadap target akhir Renstra tahun 2026.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumberdaya yang ada pada daerahnya masing-masing dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan dapat mendorong terciptanya peningkatan kegiatan ekonomi di daerah tersebut.

Dalam rangka pencapaian target pembangunan yang lebih baik, pemerintah pusat membuat suatu kebijakan yaitu penyerahan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing, yang disebut dengan desentralisasi fiskal. Salah satu misi dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah masing-masing. Di dalam pelaksanaan otonomi daerah setiap daerah dituntut untuk mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 3.13
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah
Triwulan IV Tahun 2023

Sasaran Strategis	IKU / Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Pengelolaan Pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah	5.5 %	3,75 %	68.18 %

sebagaimana Pengukuran Pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bidang pajak daerah menggunakan penilaian sebagai berikut;

Dasar penilaian capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bidang pajak daerah

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi PAD}}{\text{Jumlah APBD Non Migas}} \times 100 \%$$

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemaparan alternative solusi yang telah diambil oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bidang pajak daerah.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Dengan melakukan penguatan pada basis pemungutan, dengan mempercepat adanya revisi atau penyempurnaan Peraturan Daerah, dengan adanya



pengubahan pada tarif, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Khususnya tariff retribusi daerah.

2. Meningkatkan pengawasan. Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak daerah dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak daerah dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
3. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi retribusi daerah melalui penyederhanaan administrasi,, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
4. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.
5. Meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi. Perlu dilakukan penumbuhan kesadaran bahkan kebanggaan WP/WR membayar pajak/retribusi sebagai andil mereka membangun daerahnya.

Selain faktor keberhasilan, ada beberapa faktor yang biasa menjadi faktor penghambat atau kegagalan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Target yang ditentukan belum memenuhi analisa yang akurat;
2. Keterbatasan SDM aparatur pajak daerah ;
3. Masyarakat belum taat membayar pajak daerah daerah;
4. Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana bagi para petugas lapangan.

Adapun alternative solusi atau langkah-langkah perbaikan yang dilakukan kedepan adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan penambahan jumlah Sumber Daya Manusia tenaga pemungut pajak
2. Sosialisasi pentingnya membayar pajak bagi Pembangunan daerah

3. Diperlukan adanya penyempurnaan dan perbaikan pada manajemen pengeolaan pajak dan retribusi daerah, dengan menerapkan manajemen yang profesional.
4. Melengkapi dukungan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas pelayanan dengan melengkapi perangkat-perangkat IT, disetiap PT-UPT bidang pelayanan pajak daerah

d. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas 2 (dua) yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus :

Tabel 3.2.4
Rasio Efektivitas dan Kriteria Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja

Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas
1	2
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



Efektivitas adalah penggapaian sasaran yang tepat dari serangkaian pilihan yang ditentukan atau dengan kata lainnya tercapainya segala sesuatu yang sudah direncanakan. Sesuai dengan penjelasan para ahli diatas ditariklah kesimpulan bahwa efektivitas adalah pencapaian target yang ditentukan sebelumnya. Jadi efektivitas pajak daerah dapat diukur dari sasaran pajak daerah yang ditetapkan untuk dicapai penerimaannya.

Selain dari segi efektivitas penerimaan pajak daerah, tingkat efisiensi juga perlu dilihat sebagai salah satu syarat dari pemungutan pajak. Efisiensi adalah pemakaian sumber daya yang rendah untuk menggapai hasil pada titik tertinggi. Jadi dapat dikatakan bahwa efisiensi penerimaan pajak daerah adalah penekanan biaya yang digunakan untuk memungut pajak daerah untuk menghasilkan penerimaan yang semakin tinggi. Sebagai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya untuk mencukupi pemerintah dalam membiayai pengeluaran – pengeluarannya khususnya untuk pembangunan. Tingkat efisien penerimaan pajak daerah dapat dilihat dari semakin sedikitnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan target yang telah ditetapkan.

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Persentase Pengelolaan Pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah Rp. 4.831.739.984,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 4.975.884.500,00 atau capaian realisasi sebesar 97,10 % Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka terdapat efesiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 144.144.516,00 atau sebesar 2,9 %.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan melalui peningkatan bimbingan teknis dan pelatihan Melakukan penguatan pada aspek kelembagaan, dengan mengirimkan para petugas-petugas pajak dan retribusi daerah untuk mengikuti pelatihan-pelatihan singkat dibidang pajak daerah.

Dalam rangka pencapaian target pembangunan yang lebih baik, pemerintah pusat membuat suatu kebijakan yaitu penyerahan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing, yang disebut dengan desentralisasi fiskal.

Salah satu misi dari pelaksanaan otonomi daerah dandentralisasi fiskal adalah untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah masing-masing.

e. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program, kegiatan dan sub kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.14

Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Keuangan
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Pengelolaan Pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah	100	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan: Pengelolaan pendapatan daerah Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Pengolahan,	97,10%



			Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
			Penagihan Pajak Daerah	
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	

Dari tabel 3.14 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan. Hasil capaian kinerja dan realisasi capaian keuangan pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung indikator kinerja berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja Persentase Pengelolaan Pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi keuangan 97,10%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah Program Pendaftaran Penduduk melalui kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan sub pengelolaan pajak daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, Penetapan Wajib Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, Penagihan Pajak Daerah, Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Pelaporan Kinerja ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Implementasinya bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan dalam tahun anggaran 2023.

Secara umum seluruh sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategik dapat tercapai dengan realisasi/target 100%.

Pencapaian sasaran strategis dari 3 (tiga) indikator kinerja utama dirincikan sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM / KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian LKPD Tepat Waktu dan Sesuai SAP	100 %	1. Penunjang Urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	95,91
			2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	97,34
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan BMD	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD	100%	3. Program Pengelolaan barang Milik Daerah	95,15
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	100%	4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	97,10

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya sehingga dapat disimpulkan realiasi anggaran dari setiap program berkisar antara 95,91% - 97,10 % dan total realisasi mencapai 96,74 % menjadi indikator bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Hasil pengukuran kinerja ini juga menjadi bahan evaluasi dan analisis



kinerja atas keberhasilan dan kegagalan sehingga pencapaian sasaran strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malinau dianalisa penyebab tercapai atau tidaknya, hal ini dilakukan agar pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran mudah untuk diformulasikan dalam program dan kegiatan.

B. Langkah Perbaikan

Untuk lebih meningkatkan keberhasilan dalam pencapaian target Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, ke depan berupaya untuk mengatasi masalah serta kendala yang ada, dengan kiat pemecahan sebagai berikut:

1. Berupaya semaksimal mungkin mendorong dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dalam memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan memberikan kesempatan bagi staf/Pelaksana maupun Pejabat Ezelon III dan IV untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan dalam implementasi tuntutan Organisasi.
2. Meningkatkan jumlah pegawai yang ada dengan kualifikasi pendidikan sesuai kebutuhan organisasi.
3. Berusaha memaksimalkan pelayanan serta memperluas cakupan sasaran sehingga semakin mendekati terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat maupun Pelayanan Administrasi Keuangan Pemerintahan Daerah.
4. Melakukan pembinaan secara terus menerus kepada staf dan mendorong staf untuk meningkatkan kinerja, disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan agar sasaran yang ingin dicapai dapat dilaksanakan dengan baik, benar dan lancar.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau. Dengan harapan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja sekaligus sebagai media transparansi publik, namun



demikian masih perlu penyempurnaan sehingga selaras dengan perkembangan keadaan dan kondisi.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau, memperotek nilai 50,26 pada kategori C dengan interpretasi Cukup, dengan pernyataan : "Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik, namun demikian masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja."

	Uraian	Tahun 2023	
		Bobot	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	
2	Pengukuran Kinerja	30,00	
3	Pelaporan Kinerja		8,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	
NILAI HASIL EVALUASI		100,00	50,26
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA			C

**LKjIP****KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023**

Matrik Tindak Lanjut Terhadap Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau			
NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI/ TINDAK LANJUT	STATUS / PROGRES PENYELESAIAN
1	Komponen Perencanaan :		SELESAI
	1) Agar melakukan Perbaikan Renstra BPKD-2021-2026 dengan mempedomani RPJMD Kab. Malinau Tahun 2021-2026	1) Dokumen Renstra telah diperbaiki dengan berpedoman pada RPJMD	
	2) Agar Menyusun Renja BPKD Tahun 2023	2) Dokumen Renja telah disusun	
	3) Agar menyusun Renaksi dan target kegiatan diisi pertriwulannya dan ditanda tangani	3) Dokumen Renaksi serta target kegiatan sdah disusun dan ditandatangani	
	4) Agar mempublikasi perencanaan kinerja	4) Dokumen Perencanaan kinerja telah dipublikasiakn tepat waktu yakni batas akhir 29 Februari 2024	
	5)Agar Menyusun Pohon Kinerja, Cascading dan Dok Crosscutting sesuai dokumen perencanaan serta ketentuan yang berlaku	5) Sudah Menyusun Pohon Kinerja, Cascading dan Dok Crosscutting sesuai dokumen perencanaan serta ketentuan yang berlaku	
	6) Agar Tujuan dan Sasaran pada masing masing dokumen Perencanaan sesuai dan Relevan	6) Telah Menyesuaikan Tujuan dan Sasaran pada masing masing dokumen Perencanaan	
	7) Agar memperbaiki Indikator Kinerja Utama BPKD	7) IKU BPKD Telah diperbaiki	
	8) Agar SKP Masing-masing ASN di formalkan dan ditandatangani	8) SKP Masing-masing ASN sudah di formalkan dan ditandatangani	
	9) Agar Rencana Aksi diisi dengan target yang akan di capai	9) Dokumen Rencana Aksi telah diisi dengan target yang akan di capai	
2	Komponen Pengukuran Kinerja :		SELESAI
	1) Menyusun definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerjanya	1) sudah menyusun definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerjanya	
	2) Agar Data Kinerja yang dikumpulkan agar relevan untuk mengukur capaian Kinerja yang diharapkan	2)Data Kinerja yang dikumpulkan sudah relevan sebagai acuan untuk mengukur capaian Kinerja yang diharapkan	
	3) Agar Pengukuran Kinerja Agar memanfaatkan teknologi Informasi (Aplikasi)	3) Pengukuran Kinerja sudah memanfaatkan teknologi Informasi (Aplikasi)	
3	Komponen Pelaporan Kinerja :		SELESAI
	1) Dok Pelaporan Kinerja belum menggambarkan Kinerja BPKD dikarenakan LKJIP BPKD perlu dilakukan perbaikan	1) Dok LKJIP BPKD sudah diperbaiki untuk dapat menggambarkan pelaporan Kinerja BPKD	
	2) Agar mengungkap seluruh informasi tentang Pencapaian Kinerja	2) Telah mengungkap seluruh informasi tentang Pencapaian Kinerja	
	3)Informasi dalam Laporan kinerja berkala agar digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk pencapaian kinerja	3) Sudah menyusun dan memberikan informasi kinerja dan dilakukan secara berkala dan berjenjang	
4	Komponen Evaluasi Kinerja Internal		SELESAI
	1) Agar Melaksanakan Evaluasi akuntabilitas kinerja BPKD secara Komprehensif dengan memperhatikan pedoman dan SOP dan dilakukan secara berjenjang	1)Sudah Melaksanakan Evaluasi akuntabilitas kinerja BPKD secara Komprehensif dengan memperhatikan pedoman dan SOP dan dilakukan secara berjenjang	
	2) Agar melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja BPKD dengan pendalaman yang memadai dilaksanakan pada seluruh unit kerja serta memanfaatkan teknologi informasi	2) Sudah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja BPKD dengan pendalaman yang memadai dan dilaksanakan pada seluruh unit kerja secara berjenjang serta memanfaatkan teknologi informasi	
	3) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja BPKD diharapkan dapat mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja serta terjadi perbaikan/peningkatan kinerja hingga implementasi SAKIP dimasa yang akan daytang semakin baik	3) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja BPKD diharapkan dapat mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja serta terjadi perbaikan/peningkatan kinerja hingga implementasi SAKIP dimasa yang akan daytang semakin baik	
		Malinau, 25 Maret 2024	
		Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau	
			
		Martha Daring SE, MSi	
		Pembina TK.IV/b	
		Nip. 198012 09 200604 2 019	

Malinau, 31 Januari 2024

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Malinau,**Martha Daring, SE., MSi**

Nip. 19801205 200604 2 019



LKjIP

KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023